



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BULUKUMBA**



2021-2026

RENCANA STRATEGIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat disusun tepat waktu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba merupakan dokumen perencanaan lima tahun, dan menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bulukumba periode 2021- 2026.

Sektor Pertanian di kabupaten Bulukumba, saat ini masih menjadi salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran strategis sektor pertanian tersebut semakin nyata dimana untuk tahun 2020 pada sektor pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa sebesar 26,31%. Hal ini mengindikasikan cukup signifikan bahwa peluang untuk pengembangan sektor pertanian masih potensi.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2021-2026 masih terdapat kekurangan, sehingga saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaanya. Sehingga dokumen Renstra ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, Januari 2022

✓ Plt. Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Bulukumba



J. H. Mishaqati A. Wawo, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19621124 198903 2 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 8

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 10

 2.2.1 Sumber Daya Manusia..... 10

 2.2.2. Sarana dan Prasarana..... 11

 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 14

 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan..... 15

 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 17

 2.3.1 Kekuatan/Peluang (Internal) Pengembangan Pelayanan SKPD 17

 2.3.2 Kelemahan/Tantangan (Internal) Pengembangan Pelayanan SKPD 18

 2.3.3 Peluang (Eksternal) Pengembangan Pelayanan SKPD 19

 2.3.4 Tantangan/Ancaman (Eksternal) Pengembangan Pelayanan SKPD 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 21

 3.1 Identifikasi dan Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan 21

 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 23

 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi 29

 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 29

3.4 Telaahan terhadap Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan 30

3.5 Telaahan RTRW dan KLHS 32

3.5.1 Telaah RTRW Kabupaten Bulukumba 32

3.5.2 Telaah KLHS Kabupaten Bulukumba 33

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 34

4.1 Tujuan 34

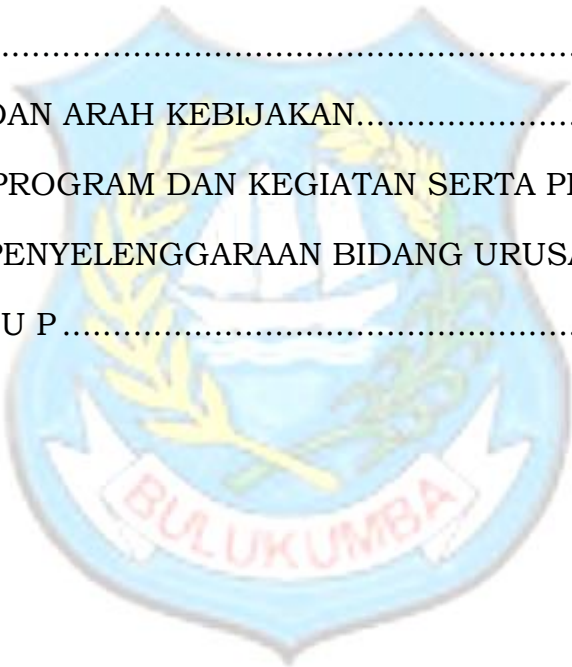
4.2 Sasaran..... 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 42

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52

BAB VIII P E N U T U P 54



DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 11

Tabel 2 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020 15

Tabel 3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba 21

Tabel 4 Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD 26

Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan..... 28

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba 35

Tabel 7 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2021-2026. 38

Tabel 8 Matriks Renstra Periode Tahun 2021-2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba 43

Tabel 9 Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021-2026 53

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan sesuai kebutuhan kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pembangunan pertanian memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu sektor unggulan, baik secara langsung berupa upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, kontribusi dalam Peningkatan PDRB dan peningkatan pendapatan serta ketersediaan dan keamanan pangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja tahunan (Renja). Dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD).

Pembangunan pertanian pada dasarnya memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu pencapaian ketahanan pangan, agribisnis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai peran strategis pertanian tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba adalah: (1) pendekatan teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi perencanaan daerah dalam lima tahun ke depan. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

Sebagaimana amanah Pasal 11 ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Lebih lanjut pada pasal 13 ayat (1) disebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba sendiri selain merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026, juga merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda tersebut menetapkan adanya penggabungan tiga perangkat daerah yaitu Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Ketahanan Pangan, kemudian dilebur menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

- Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);

23. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 137).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bulukumba untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk menyediakan instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Untuk menjadikan instrumen pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Untuk menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan demikian maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun secara sistematis seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari dokumen Rencana Strategis ini sangat diperlukan untuk menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan sebagai sebuah perangkat daerah. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba diantaranya adalah kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan organisasi dalam kurun lima tahun.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

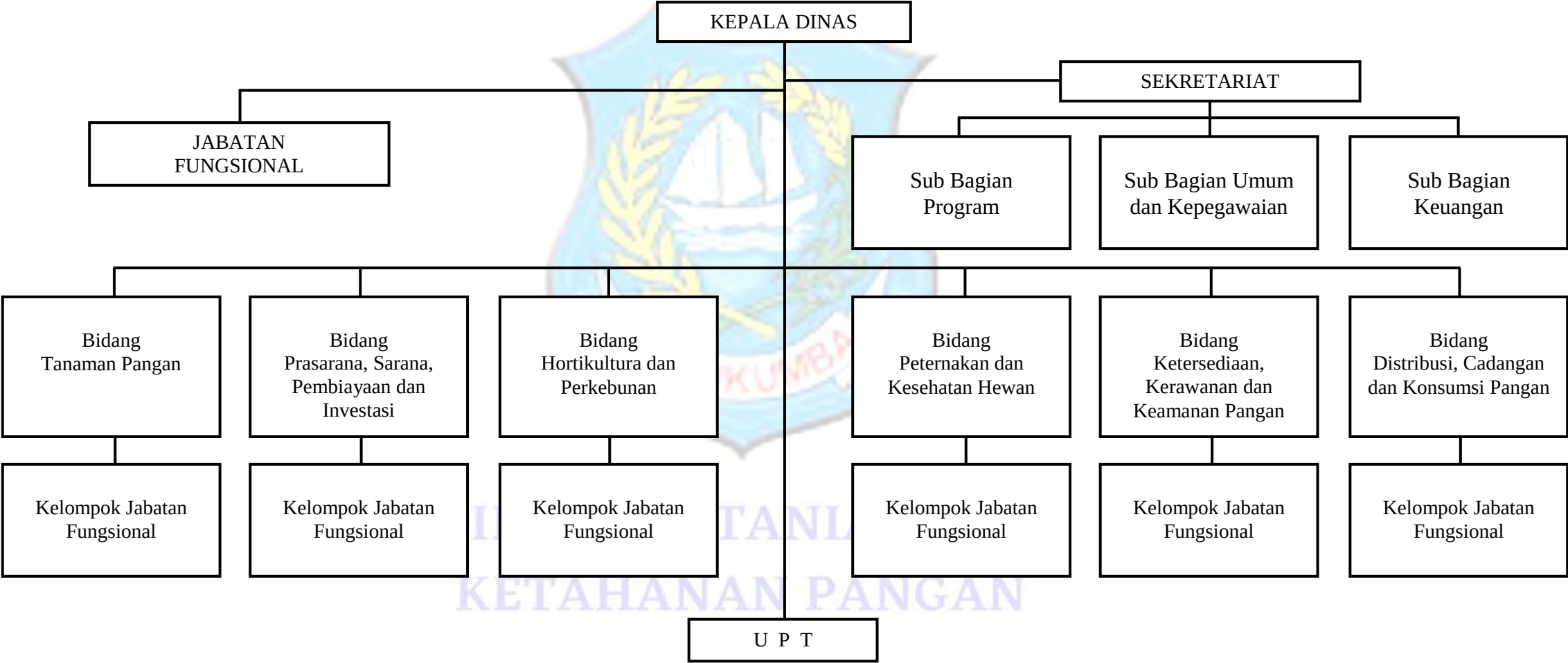
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengamanahkan pembentukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba (belum termasuk UPTD) pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 124 orang, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis kelamin:
 - 1. Laki-laki : 148 Orang
 - 2. Perempuan : 89 Orang
- b. Berdasarkan tingkat Pendidikan:
 - 1. Doktoral (S3) : -
 - 2. Pasca Sarjana (S2) : 41 Orang
 - 3. Sarjana (S1) : 103 Orang
 - 4. D-IV : 5 Orang
 - 5. D-III : 6 Orang
 - 6. SLTA/ Sederajat : 25 Orang
- c. Berdasarkan Unit Kerja :
 - 1. Sekretariat : 29 Orang
 - 2. Bidang Tanaman Pangan : 7 Orang
 - 3. Bid. Hortikultura dan Perkebunan : 10 Orang
 - 4. Bid. Prasarana, Sarana, Investasi : 12 Orang
 - Dan Pembiayaan
 - 5. Bidang Peternakan dan Kesehatan : 22 Orang
 - Hewan
 - 6. Bidang Distribusi, Cadangan dan : 10 Orang
 - Konsumsi Pangan
 - 7. Bidang Ketersediaan, Kerawanan : 10 Orang
 - Dan Keamanan Pangan
 - 8. UPTD Mekanisasi Pertanian : 4 Orang

Wilayah I

9. UPTD Mekanisasi Pertanian : 3 Orang

Wilayah II

10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan : 3 Orang

11. UPTD Rumah Potong Hewan : 4 Orang

12. Fungsional Penyuluh : 123 Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana yang secara kuantitatif cukup memadai, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					
1	Tanah Bangunan Kantor	11	-	-	11
2	Bangunan Gedung Kantor	112	-	-	112
3	Kendaraan Roda 2 dan 4	80	13	15	108
4	Mesin ketik, Hitung, Porporasi	-	-	10	10
5	Lemari	51	-	3	54
6	Meja Kerja	125	7	10	142
7	Kursi Kerja	817	5	25	847
8	PC, Komputer, Laptop, Notebook	62	10	17	89
9	Printer, Scanner	33	-	15	48
Jumlah		1291	35	95	1421
Pernakan Dan Kesehatan Hewan					
1	Kantor				1
2	Bangunan Poskeswan				2
3	Bangunan ITSU				1
4	Bangunan PPPKH				3
5	Kebun Bibit Rumput (KBR)				1
6	Bangunan RPH				1
7	Kendaraan Roda 4				2
8	Kendaraan Roda 2				19
9	Kendaraan Roda 2				2
10	Kendaraan Roda 2				31
11	Timbangan Ternak				1
12	Komputer/PC				6

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
13	Komputer/PC				2
14	Printer				9
15	Printer				1
16	Kulkas				3
17	Kulkas				3
18	Kulkas / Freezer				1
19	Meja				38
20	Meja				5
21	Kursi				86
22	Almari				16
23	Filing Cabinet				5
24	Filing Cabinet				1
25	Filing Cabinet				1
26	Kipas Angin				4
27	AC				11
28	Mesin Ketik				3
29	UPS				1
30	Meja Komputer				1
31	Meja Rapat				7
32	Kendaraan Roda 3				2
33	Kendaraan Roda 3				2
34	USG				1
35	Komputer/Laptop				1
36	Komputer/Laptop				14
37	pH meter				5
38	Mikroskop				1
39	Mikroskop				2
40	Brankas				1
41	Brankas				1
42	Genset				1
43	Mesin Giling Daging				1
44	Heighcleaner				1
45	Tandon Air				2
46	Golok Tulang				2
47	Container N2 Cair				4
48	Sound System				1
49	Layar Proyektor				1
50	Camera Digital				1
51	Pompa N2 Cair				1
Jumlah					313
Ketahanan Pangan					
1	Tanah / bangunan gedung	1 unit	-	-	1 unit
2	Tanah / bangunan kantor	1 unit	-	-	1 unit

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
3	Tanah / bangunan lumbung pangan	22 unit	-	-	22 unit
4	Station Wagon Avansa	1 unit	-	-	1 unit
5	Station Wagon Innova	1 Unit	-	-	1 Unit
6	Pick Up	1 Unit	-	-	1 Unit
7	Sepeda Motor	16 Unit	-	3 unit	19 unit
8	Timbangan	1 Unit	-	-	1 Unit
9	Hand tractor	2 Unit	-	-	2 Unit
10	MesinAbsen	1 Unit	-	-	1 Unit
11	LemariBesi	7 Unit	-	-	7 Unit
12	Filling Besi/Metal	10 Unit	-	-	10 Unit
13	KipasAngin	4 Unit	-	-	4 Unit
14	Ac Split	11 Unit	-	-	11 Unit
15	Laptop	18 unit	-	1 unit	19 unit
16	Notebook	1 Unit	-	1 unit	2 unit
17	Printer	21 Unit	-	-	21 Unit
18	PC Komputer	1 Unit	-	-	1 Unit
19	Sofa	1 Unit	-	-	1 Unit
20	MejaKomputer	5 Unit	-	-	5 Unit
21	Meja Biro	10 Unit	-	-	10 Unit
22	MejaRapat	3 Unit	-	-	3 Unit
23	MesinPompa	2 Unit	-	-	2 Unit
24	LCD	1 Unit	-	-	1 Unit
25	LemariKayu	9 Unit	-	-	9 Unit
26	LemariKaca	5 Unit	-	-	5 Unit
27	KursiPutar	3 Unit	-	-	3 Unit
28	KursiKerja	110 Unit	-	-	110 Unit
29	LemariEs	2 Unit	-	-	2 Unit
30	MejaKerja	41 unit	-	-	41 unit
31	MejaKerjaEselon II	1 Unit	-	-	1 Unit
32	KursikerjaEselon III&IV	19 Unit	-	-	19 Unit
33	LemariBukuPerpustakaan	2 Unit	-	-	2 Unit
34	SumurBor	1 Unit	-	-	1 Unit
35	JaringanListrik	1 Unit	-	-	1 Unit
36	TendaLipat	2 Unit	-	-	2 Unit
37	Brandkas	2 Unit	-	-	2 Unit
38	Handycam	1 Unit	-	-	1 Unit
39	Wireless	1 Unit	-	-	1 Unit
40	Sound System	4 Unit	-	-	4 Unit
41	Faximale	1 Unit	-	-	1 Unit

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
TOTAL		323	-	5	328

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.



DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba melalui pelaksanaan program pembangunan pertanian dari capaian kinerja pelayanan SKPD digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																
1	Rata-rata Pendapatan Perkapita Masyarakat Petani	101.490	103.520	105.590	107.702	109.856	175.000	186.000	194.100	203.700	203.700	172	180	184	189	185
2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terhadap PDRB %)	45.92	46.84	47.78	48.73	49.71	31.75	31.03	28.78	26.62	26.62	69	66	60	55	54
3	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	3.832.331	3.908.978	3.987.157	4.066.900	4.148.238	3.543.539	3.908.978	3.996.721	5.277.238	5.277.238	92	100	100	130	127
4	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan atas Dasar Harga Konstan(Juta)	2.913.740	2.972.015	3.031.455	3.031.455	3.092.084	3.153.926	2.417.887	2.352.397	3.273.768	3.273.768	108	81	78	108	106
5	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	12	12	13	13	13	65.6	32.69	61.2	53.72	71.18	547	572	471	413	548
6	Jumlah Tempat Pengolahan Padi yang Menggunakan Teknologi (Unit)	12	15	18	21	24	84	23	30	15	11	700	153	167	71	46

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PETERNAKAN DAN KESWAN																
	Pertumbuhan Populasi															
1	Sapi Potong	71.488	74.919	78.665	82.756	87.308	70.662	72.602	75.993	76.434	76.797	99	97	97	92	88
2	Kerbau	1.594	1.618	1.644	1.670	1.698	1.588	1.616	1.633	1.620	1.505	100	100	99	97	89
3	Kuda	27.682	28.125	28.603	29.089	29.613	27.644	28.025	28.473	28.037	26.304	100	100	100	96	89
4	Kambing	33.576	35.255	37.194	39.426	41.989	32.678	33.677	34.726	35.229	35.463	97	96	93	89	84
5	Ayam Buras	732.729	791.347	870.482	966.235	1.091.846	712.681	726.114	740.804	745.015	745.015	97	92	85	77	68
6	Ayam Ras Petelur	283.714	312.085	343.294	377.623	415.385	282.426	310.218	452.158	463.793	638.724	90	90	120	112	400
7	Ayam Ras Pedaging	2.244.000	2.468.400	2.715.240	2.986.764	3.285.440	2.063.600	2.295.000	2.381.401	2.550.438	2.309.930	84	85	80	78	112
8	Itik	19.581	22.029	24.893	28.524	32.210	19.581	19.494	20.981	21.032	21.372	89	78	74	65	109
KETAHANAN PANGAN																
1	Ketersediaan pangan utama (%)	306,43%	359,43%	359,43%	359,43%	359,43%	326,58%	306,75%	381,58%	393,10%	389,13%	107%	85%	106%	109%	108%
2	Ketesediaan energi dan protein perkapita															
	- Ketersediaan energi (Kkal)	17.603	17.603	7.584	7.584	7.584	17.544	17.658	6.904	8.425	7.424	100%	100%	91%	111%	98%
	- Ketersediaan Protein (gram)	1.615	1.615	575	575	575	1.023	1.184	229	226	241	63%	73%	40%	39%	42%
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45,45%	45,45%	91%	36%	0%	0%	0%	0%	0%

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.3.1 Kekuatan/Peluang (Internal) Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang pengembangan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, untuk penyelarasasan Program Prioritas Nasional, maka Kabupaten Bulukumba ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan Pala dan Cengkeh sebagaimana tertuang dalam Program peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan.
2. Secara Nasional Kabupaten Bulukumba ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pertanian (Padi, Jagung, Sapi Potong, Cabai, Kakao, Lada dan cengkeh) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 tentang Lokasi Pertanian Nasional.
3. Pemanfaatan teknologi informasi semakin mendorong pengembangan sektor pertanian melalui satu data pertanian.
4. Regenerasi pelaku usaha pertanian dengan melibatkan pemuda tani milenial melalui program Kementerian Pertanian yaitu Program Yess (*Youth entrepreneurship and employment support service*).
5. Koordinasi dan Kerjasama antar instansi terkait dalam rangka peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam mendukung peningkatan produksi hasil pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, dan peternakan).

2.3.2 Kelemahan/Tantangan (Internal) Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Kompetensi SDM Aparatur baik yang berstatus ASN maupun Non ASN, masih perlu ditingkatkan.
2. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Pembangunan Peternakan yang sebagian besar sasarannya adalah para petani peternak skala pedesaan, perlu dikembangkan menjadi usaha peternakan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau skala industri.
4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nilai ekonomis usaha peternakan, tata cara pemeliharaan ternak, pentingnya kesehatan hewan dan penanggulangan penyakit serta keamanan konsumsi bahan-bahan asal hewan.
5. Harga pakan dan obat-obatan yang masih tinggi sehingga masih ada anggapan bahwa peternakan merupakan bisnis yang mahal dan beresiko.
6. Berkembangnya berbagai jenis pangan segar, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran impor yang beredar dipasaran.
7. Masih banyaknya yang beredar jenis buah dan sayuran yang menggunakan bahan tambahan yang dapat merugikan kesehatan.
8. Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
9. Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
10. Masih tingginya tingkat kebutuhan dan konsumsi beras
11. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan secara optimal.
12. Belum adanya wilayah per komoditi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi peruntukan pemanfaatan lahan lainnya, khususnya permukiman dan perdagangan.
14. Pola pikir masyarakat masih mengharapkan bantuan dari Pemerintah.

2.3.3 Peluang (Eksternal) Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Dukungan regulasi yang baik.
2. Perekembangan sistem informasi.
3. Koordinasi dan kerjasama antar OPD dan Kementerian terkait.

2.3.4 Tantangan/Ancaman (Eksternal) Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Dampak perubahan iklim

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

2. Alih fungsi lahan

Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, pengendalian pertumbuhan penduduk, reformasi agraria serta penguatan status kepemilikan lahan.

Revolusi hijau melalui penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian. Kondisi ini semakin diperparah dengan berubahnya kebiasaan petani dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik. Struktur fisik dan kimia tanah di lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi masif dan kurang respon terhadap penggunaan input produksi, sehingga peningkatan produktifitas menjadi stagnan, bahkan cenderung

menurun. Pesatnya laju pembangunan nasional di berbagai bidang yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Otonomi daerah juga telah mendorong peningkatan laju pertumbuhan permintaan/pemanfaatan lahan multi sektoral yang semakin meningkat. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru. Konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Peningkatan jumlah penduduk.

Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 Km² terdiri dari 27 kelurahan dan 109 desa dengan jumlah penduduk 418.326 jiwa pada tahun 2019 (berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba 2019) dengan kepadatan penduduk 362 jiwa/km². Tentunya hal ini menjadi tantangan yang cukup besar dalam hal upaya pemenuhan kebutuhan pangan utama beras.

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah kunjungan wisata domestik, mancanegara dan internasional yang termasuk dalam 100 (seratus) daerah destinasi wisata *Wonderful Indonesia* yang tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Bulukumba, hal ini tentunya harus juga didukung oleh ketersediaan bahan pangan untuk para wisatawan yang berkunjung, tercatat sebanyak 262.225 jiwa jumlah kunjungan pada tahun 2018.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan pertanian Kabupaten Bulukumba periode tahun 2022-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya yaitu periode tahun 2016-2021. Agar dukungan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bulukumba dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

3.1 Identifikasi dan Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Masalah pokok terhadap tugas dan fungsi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Tanaman Pangan, Hortukultura dan Perkebunan			
1.	Tingkat Produktivitas dan daya saing produk pertanian, kualitas SDM	Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian	1. Masih kurangnya penggunaan bibit unggul pertanian
			2. Rendahnya penggunaan sarana produksi
			3. Pengetahuan dan perilaku serta sikap petani
			4. Penerapan sistem tumpang sari yang tidak sesuai standar teknis
			5. Kurangnya pengetahuan petani tentang pengendalian hama penyakit
		Masih rendahnya daya saing produk pertanian	1. Penggunaan sarana produksi yang tidak tepat
			2. Tingkat residu yang tinggi akibat penggunaan pestisida yang berlebih
			3. Penanganan panen dan pasca panen yang tidak tepat
			4. Rendahnya upaya promosi produk pertanian
			5. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tani melakukan registrasi produk pertanian
		Masih rendahnya kualitas SDM Penyuluh	1. Pola rekrutmen yang tidak tepat
			2. Kurangnya pelatihan teknis
			3. Usia petugas lapangan/penyuluh yang sudah berumur
			4. Rendahnya kemampuan penguasaan teknologi informasi
		Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan	1. Belum tersedianya SDM yang memadai
			2. Kurangnya pelatihan teknis
			3. Pengelolaan administrasi belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pernakanan dan Kesehatan Hewan			
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak dan daya saing produk peternakan masih rendah	Pertumbuhan Populasi Ternak Rendah	1. Kelangkaan pejantan untuk KA
			2. Pelaksanaan IB belum merata
			3. Tingginya penyakit dan gangguan reproduksi
			4. Tingkat kematian pedet tinggi
		Sarana dan Prasana dan Daya Saing Produk Hewan yang Belum Optimal	1. Penggunaan sarana produksi yang tidak optimal
			2. Rendahnya kualitas dan jenis kemasan produk olahan ternak
			3. Rendahnya upaya promosi produk ternak dan olahan ternak
			4. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tani melakukan registrasi produk pertanian
		Skala Usaha Peternakan, Kelembagaan Kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal	1. Rendahnya kompetensi SDM peternak
			2. Kepemilikan ternak yang berskala kecil dan masih sebagai usaha sampingan
			3. Lemahnya kelembagaan kelompok peternak
			4. Akses informasi terhadap modal yang masih terbatas untuk peningkatan kapasitas usaha
		Ancaman Penyakit Hewan menular strategis dan zoonosis (PHMZSZ), gangguan reproduksi ternak dan pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali	1. Kelembagaan Pusat Kesehatan Hewan masih terbatas
			2. Terbatasnya formasi tenaga medik dan paramedik veteriner
			3. Partisipasi masyarakat terhadap pengendalian penyakit yang masih rendah
			4. Pemetaan penyakit belum optimal
		Belum Optimalnya Produksi Ternak	1. Masih banyak lahan terlantar potensial yang tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha peternakan;
			2. Belum optimalnya intensifikasi penanaman HPT;
			3. Lemahnya manajemen, teknologi, dan sarana penyimpanan dan pengawetan pakan ternak, terutama hijauan;
			4. Ketersediaan Alsintan pengolahan limbah pertanian untuk pakan ternak belum merata
Ketahanan Pangan			
1	Rendahnya tingkat pendapatan petani	1. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.	1. Kurangnya pemahaman masyarakat (Kelompok Wanita Tani) dalam melakukan budidaya pangan lokal
		2. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal	2. Kurangnya akses penyaluran produk rumahan berbasis sumber daya lokal
			1. Lambatnya Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber	Rendahnya peran serta masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	1. Kurangnya diversifikasi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan
3	Belum terwujudnya kemandirian pangan	Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangaan	1. Rendahnya volume pengadaan cadangan pangan. 2. Masih kurangnya infrastruktur pendukung kemandirian pangan

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba adalah meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga menambah daya saing produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Olehnya itu diperlukan kualitas sumberdaya pegawai (ASN) baik struktural maupun fungsional yang memiliki kompetensi, kapabilitas dan memiliki kepedulian terhadap tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas.

Dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan juga tidak kalah penting untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan

dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.

1. **PRODUKTIF.** artinya Mendorong seluruh sektor pembangunan meliputi ekonomi, SDM,Infrastruktur,sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera PANRITA.
2. **BERKARAKTER.** artinya Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beprikehidupan dan kemasyarakatan PANRITA LEBBI”
3. **KEARIFAN LOKAL.** artinya Potensi adat Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan PANRITA.
4. **MAJU** artinya pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
5. **SEJAHTERA.** artinya Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki,dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan,kesehatan, pendidikan,tempat tinggal,air bersih,pertanahan,sumberdaya alam,lingkungan hidup,rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. baik bagi perempuan maupun laki-laki;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah

dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi:

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor;
4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat;
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara;
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat;
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme;
11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan.

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD

NO	POKOK- POKOK VISI	MISI
1	Produktif	1. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor (Misi 3 RPJMD) 2. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional 3. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat 4. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat 5. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah 6. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2	Berkarakter	1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal 4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat 5. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme 6. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 7. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
3	Kearifan Lokal	1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal 4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat 5. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 6. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
4	Maju	1. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor (Misi ke 3 RPJMD)

		2. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional 3. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara 4. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat 5. Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah 6. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5	Sejahtera	1. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor (Misi ke 3 RPJMD) 2. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional 3. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara 4. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat 5. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah 6. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah mendukung dan mensukseskan misi ke-3 melalui program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Bulukumba dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan

Visi RPJMD	Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera									
Misi ke-3	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran (4) : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	Angka	-0,42	1,52	2,85	3,77	4,69	5,6	5,6

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi

Urusan Pertanian pada Pemerintah pusat, dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Pada tingkatan Provinsi urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Kementerian Pertanian menetapkan 7 (Tujuh) sasaran strategis dalam Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Penyediaan Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
6. Terkendalinya penyebaran organisme penyebaran pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman;
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional;
8. Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
9. Terkelolanya anggaran pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba yaitu meningkatkan hasil pertanian, meningkatnya daya saing produk pertanian, meningkatkan potensi dan kualitas penyuluh pertanian serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan OPD.

3.4 Telaahan terhadap Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaahan renstra pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel Menetapkan sasaran dalam Rencana Strategis tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan berbasis sumber daya alam dengan langkah strategis sebagai berikut:

- Hirilisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya tanaman pangan dan Hortikultura dan Perkebunan secara ekologis
- Dukungan prasarana dan sarana pertanian
- Pengolahan dan pemasaran produk
- Perbaikan Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang tertuang pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Bulukumba yaitu meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan daya saing produk.

Dengan demikian Renstra Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 sangat mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel menetapkan sasaran dalam Rencana Strategis tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, dengan langkah strategis sebagai berikut:

- Peningkatan angka kelahiran
- Penurunan angka kematian
- Pengawasan pemotongan ternak
- Pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak
- Serifikasi RPH-R/RPU
- Produk Daging Yang Bersertifikasi Halal
- Sertifikasi Unit Usaha Pengolahan
- Perbaikan Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba yaitu meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan daya saing produk.

Dengan demikian Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026 sangat mendukung pelaksanaan renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan

3. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

menetapkan sasaran dalam Rencana Strategis tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, dengan langkah strategis sebagai berikut:

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018-2023, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi

yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Bulukumba yaitu meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan daya saing produk. Dengan demikian Renstra Dinas Pertanian dan ketahanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026 sangat mendukung pelaksanaan renstra Dinas ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Selatan

3.5 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5.1 Telaah RTRW Kabupaten Bulukumba

Pengembangan wilayah Kabupaten Bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Keberadaan RTRW Kabupaten Bulukumba untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. RTRW juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 RTRW Kabupaten Bulukumba, Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Adapun kebijakan penataan ruang daerah kbaupaten Bulukumba, terdiri atas :

- a. pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
- b. pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;
- c. peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan; dan

- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten Bulukumba di atas yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana fungsi urusan pembangunan Pertanian daerah mempunyai peran dalam mengelola kawasan pengembangan pertanian dengan memperhatikan struktur ruang yaitu Rehabilitasi Pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan.

3.5.2 Telaah KLHS Kabupaten Bulukumba

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba serta merumuskan mitigasi atau alternative program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba disusun mendahului penyusunan dokumen RENSTRA ini,

Sehingga KLHS tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta merumuskan atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil penyusunan perencanaan KLHS berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Bulukumba.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dalam konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba merefleksikan misi pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dan analisis isu-isu strategis yang dikemukakan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba menetapkan 2 (Dua) tujuan strategis pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang Pertanian untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

4.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi penyuluh pertanian
3. Meningkatnya ketersediaan dan keamanan konsumsi pangan
4. Meningkatnya tata Kelola pemeritahan yang baik

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Bulukumba selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada uraian pada tabel berikut:

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba

Visi: Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera																				
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor																				
TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN																				
No	Tujuan Kabupaten	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	2021	Target Kinerja Tujuan Kabupaten Tahun ke					Akhir Periode	Sasaran Kabupaten	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021	Target Kinerja Sasaran Kabupaten Tahun ke					Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	-	23,47	22,76	22,28	22,04	22,02	22,24	22,24	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian (%)	-0,77	-0,42	1,52	2,85	3,77	4,69	5,60	5,60
TUJUAN DAN SASARAN OPD																				
No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Kondisi Awal	2021	Target Kinerja Tujuan OPD Tahun ke					Akhir Periode	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kondisi Awal	2021	Target Kinerja Sasaran OPD Tahun ke					Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian (%)	-0,77	-0,42	1,52	2,85	3,77	4,69	5,60	5,60	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (%)	72	72	73	75	76	78	80	80
											Meningkatnya Kompetensi dan Kualitas Penyuluh Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	71,18	36,66	54,57	57,29	60,16	63,17	66,33	66,33
											Meningkatnya Ketersediaan dan Keamanan Komsumsi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (%)	389,13	392,06	415,96	415,96	432,75	441,4	449,60	449,60
												Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita								
												a. Ketersediaan Energi (kkal)	7423,66	2662,5	4025,36	4207,57	4291,72	4377,56	4465,11	4465,11
												b. Ketersediaan Protein (gram)	240,77	69	98,71	100,69	102,7	104,7	106,85	106,85
												Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	36	60	90	90	90	90	90	90
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (%)	99,69	99,76	99,78	99,81	99,85	99,88	99,90	99,90											

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba selama lima tahun ke depan akan mendorong upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan sasaran strategis meningkatnya produksi lahan pertanian, meningkatnya daya saing produk dan meningkatnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia penyuluh dan kelembagaan petani baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan lainnya adalah upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Strategi OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba selama lima tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan lahan pertanian dengan arah kebijakan penentuan wilayah sasaran lokasi yang akan dilakukan upaya intensifikasi lahan untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditi tertentu berbasis kawasan.
2. Konservasi lahan pertanian yang diupayakan adalah melaksanakan serangkaian upaya untuk mencegah kerusakan tanah akibat eksploitasi, salinisasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi bahan kimiawi, sehingga kesuburan lahan dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali, salah satunya adalah penggunaan pupuk organik dan pengurangan
3. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pertanian, dilakukan melalui upaya peningkatan, pemanfaatan dan perlindungan lahan, ketersediaan air untuk lahan pertanian serta peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian.
4. Peningkatan Angka Kelahiran Ternak yang Disertai Penurunan Angka Kematian Ternak.
5. Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) atau praktek pengelolaan sumber daya pertanian (pangan, buah dan sayur) dan perkebunan secara baik, benar dan tepat. Serta Penerapan penanganan pasca panen berbasis *Good Handling Practices* (GHP) **Off Farm**.
6. Peningkatan kualitas SDM tenaga teknis penyuluhan. Pengembangan kualitas SDM diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. Kualitas SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya

saing tinggi dan berkelanjutan.

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi kelembagaan dan fasilitasi pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Asuransi Usaha Pertanian (AUTP).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba memiliki 2 (dua) strategi untuk mendukung sasaran strategis terkait fungsi kesekretariatan dan kinerja dinas yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dinas dalam mencapai tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur non teknis. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mendukung kinerja dinas terkait pelayanan internal dan eksternal yang lebih mengarah pada pemanfaatan/penguasaan teknologi informasi.

Sasaran strategis dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini:

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tabel 7 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2021-2026.

Visi RPJMD		: Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera		
Misi ke-3 RPJMD		: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor		
	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD
1.	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta kualitas petani yang didukung oleh peningkatan nilai tambah dan pelayanan system informasi komoditas unggulan pertanian; 2. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung produksi pertanian Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, di bidang pertanian 3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk pertanian Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian yang potensial dan Akselerasi Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya alam

				4. Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan 5. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman Peningkatan pengolahan pelabuhan serta alatalat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian	Pengembangan dan Intensifikasi Lahan Pertanian Berbasis Kawasan	Pengembangan lahan pertanian meliputi intensifikasi, diversifikasi dan peremajaan
			Konservasi Lahan Pertanian	Menetapkan suatu wilayah untuk pengembangan komoditi tertentu
			Peningkatan dukungan sarana dan prasarana	Mendorong petani untuk melakukan upaya konservasi lahan
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan sarana dan prasarana

			Peningkatan Angka Kelahiran Ternak	Intensifikasi Inseminasi Buatan dan Kawin Alam Serta Pencegahan Penyakit Reproduksi
			Penurunan Angka Kematian Ternak	Pencegahan Penyakit dan Vaksinasi
				Pengawasan Mutu Obat Hewan
				Pelayanan Kesehatan Hewan dan Klinik Hewan
			Penerapan penanganan pasca panen berbasis Good Agriculture Handling	Meningkatkan jumlah petani yang menerapkan GAHP
			Penerapan budidaya berbasis Good agriculture practice (gap) on farm	Mendorong petani untuk melakukan penerapan budidaya berbasis
	2. Meningkatnya Kualitas dan kompetensi penyuluh pertanian	Peningkatan kulaitas SDM ASN		Meningkatkan frekuensi pelatihan teknis untuk para penyuluh
			Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok	Meningkatkan peran penyuluh pertanian/PPL dalam pembinaan
	3. Meningkatnya Ketersediaan dan keamanan konsumsi pangan	Ketersediaan Pangan Utama		Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat
			Mengembangkan diversifikasi dan konsumsi pangan	Sosialisasi diversifikasi pangan dan konsumsi pangan

			Meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas mutu dan keamanan pangan	Pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang beredar
		4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan OPD	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.	Peningkatan kualitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara
			Peningkatan kualitas SDM aparatur non teknis.	Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dan menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, diuraikan dalam tabel berikut:

**DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Tabel 8 Matriks Renstra Periode Tahun 2021-2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	Target												KONDISI AKHIR
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Rp	Indikator	Rp	Indikator	Rp	Indikator	Rp	Indikator	Rp	Indikator	Rp	Indikator	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba	%	100	22.089.431.603	100	24.644.138.452	100	26.841.523.968	100	26.487.651.068	100	27.201.206.592	100	28.878.008.347	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba yang lebih baik			150.640.660		106.864.361		109.026.192		110.756.224		112.776.902		125.831.392		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	68.594.000	6	21.725.667	2	21.725.667	2	21.725.667	2	21.725.667	2	21.725.667	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	8.334.980	6	4.450.000	1	4.450.000	1	4.450.000	1	4.450.000	1	4.450.000	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	3.334.980	6	3.400.000	1	3.600.000	1	3.644.223	1	3.753.549,37	1	5.000.000	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	6.909.820	6	7.467.115	1	7.650.000	1	7.586.912	1	7.649.519,24	1	10.500.000	1	11
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	3.334.980	6	3.400.000	1	3.600.000	1	3.644.223	1	3.753.549,37	1	5.000.000	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	9.545.900	4	15.000.500	6	15.750.525	6	16.538.051	6	17.364.954	6	18.233.202	6	6
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Bulan	12	50.586.000	12	51.421.080	12	52.250.000	12	53.167.149	12	54.079.663,24	12	60.922.524	12	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan DPKP Kab. Bulukumba			20.187.069.100		22.622.545.314		23.536.719.246		24.043.771.870		24.892.791.217		26.214.213.259		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pendapatan	Bulan	12	19.828.865.230	12	22.452.215.130	12	23.355.719.346	12	23.863.677.572	12	24.707.594.087	12	26.017.505.112	12	60
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	Bulan	12	345.382.500	12	157.002.900	12	167.500.000	12	166.564.377	12	171.561.307,91	12	176.708.147,00	12	60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	12.821.370	3	13.327.284	1	13.499.900,00	1	13.529.922	1	13.635.822,45	1	20.000.000,00	1	8
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah DPKP Kab. Bulukumba			2.988.000		10.132.920		10.500.000		10.695.205		10.989.061		11.291.733		
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	-	1	3.577.640	1	3.700.000,00	1	3.765.068,28	1	3.863.020,32	1	3.963.910,93	1	6
	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	Bulan	12	2.988.000	12	3.077.640	12	3.200.000,00	12	3.265.068,28	12	3.363.020,32	12	3.463.910,93	12	72
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	-	2	3.477.640	2	3.600.000,00	2	3.665.068,28	2	3.763.020,32	2	3.863.910,93	2	12

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kab. Bulukumba			76.525.000		77.625.000		57.000.000		58.545.000		60.136.350		70.775.441		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	9.000.000	1	1
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	66.375.000	2	72.125.000	2	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350,00	1	56.275.441	1	8
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Orang	0	10.150.000	4	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Bulukumba			881.714.660		931.363.791		1.020.914.426		1.026.476.977		1.078.990.938		1.266.230.736		
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Paket	1	4.355.000	1	4.444.994	1	5.525.000	1	4.777.962	1	4.876.301	1	6.477.590	1	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan rumah tangga kantor Kab. Bulukumba	unit	25	9.037.800	33	9.171.657	33	10.525.000	35	10.047.511	35	10.743.936	35	11.446.254	40	40
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK	Paket	1	247.027.150	1	249.390.442	1	254.557.007	1	264.477.504	1	274.339.626	1	306.557.105	1	1
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Paket	1	52.678.410	1	53.599.233	1	52.078.181	1	55.524.583	1	56.530.791	1	67.929.300	1	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Koran	Bulan	12	960.000	12	960.000	12	1.200.000	12	1.500.000	12	1.800.000	12	1.500.000	12	60
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu	Bulan	12	24.902.000	12	25.351.700	12	25.814.891	12	26.291.978	12	26.783.377	12	34.912.000	12	72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar privinsi	Bulan	12	542.754.300	12	588.445.765	12	671.214.347	12	663.857.439	12	703.916.906	12	837.408.486	12	60
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor DPKP			141.965.621		234.360.000		1.039.247.436		660.214.109		475.734.200		466.234.200		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan roda 4 DPKP Kab. Bulukumba	unit	1	-	0	90.000.000	3	625.000.000	6	517.308.000	5	306.127.240	9	321.127.240	10	33
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubel	unit	1	9.497.400	8	14.360.000	3	35.000.000	9	15.612.724	5	16.006.106	5	16.006.106	5	35
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	Paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	15.000.000	1	-	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor DPKP Kab. Bulukumba	Paket	1	79.268.066	1	75.000.000	1	80.436.978	1	82.850.087	1	85.335.590	1	85.335.590	1	6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	5	11.553.080	4	5.000.000	2	33.336.488	11	11.661.488	1	19.500.000	26	10.000.000	5	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	11.647.075	1	-	0	240.473.970	1	-	0	-	0	-	0	
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aplikasi basis data pertanian	Paket	1	30.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	1	32.781.810	1	33.765.264	1	33.765.264	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum DPKP Kab. Bulukumba			269.317.584	-	279.602.232		285.660.120		286.993.380		290.856.073		346.844.824		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Terbayar	Bulan	12	173.317.584	12	178.562.232	12	183.136.920	12	182.942.484	12	185.231.650	12	215.599.668	12	72
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan dan keamanan kantor DPKP Kab. Bulukumba	Orang	5	96.000.000	5	101.040.000	5	102.523.200	5	104.050.896	5	105.624.423	5	131.245.156	5	5

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset kantor DPKP Kab. Bulukumba			379.210.978	-	381.644.833		782.456.548		290.198.304		278.931.851		376.586.763		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK dan Kir kendaraan dinas roda 2 dan 4 terbayarkan	unit	211	103.138.000	211	104.208.000	247	115.246.240	345	106.315.627	346	117.817.096	351	187.417.096	351	351
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang terpelihara	unit	10	87.440.000	10	114.682.466	15	68.500.000	12	125.548.049	12	98.414.490	10	98.414.490	10	10
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab	Paket	1	152.781.800	1	126.010.754	1	560.096.577	1	26.489.474	1	29.739.658	1	47.889.658	1	1
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	unit	3	2.030.000	3	2.233.000	2	2.233.000	2	2.233.000	2	2.095.088	2	2.000.000	2	10
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Paket	1	33.821.178	1	34.510.613	1	36.380.732	1	29.612.154	1	30.865.518	1	40.865.518	1	1
URUSAN PERTANIAN																	
II	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	%	71,69	2.964.349.950	72	16.668.836.281	73	8.326.643.063	75	9.368.411.705	76	9.638.958.091	78	22.517.848.231	80	80
		Persentase Pertumbuhan populasi ternak komoditi unggulan	%	15,3		16,9		18		20		22		25		28	28
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Rasio jumlah Kelompok tani yang berusaha tani sesuai anjuran	%	1,6	309.976.500	-	1.917.952.206	6,5	1.326.643.063	13,1	1.678.411.705	19,6	1.668.958.091	26	1.832.848.231	33	39
	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Jumlah kelompok tani yang terdampingi sesuai komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Kelompok	25	179.247.000	-	71.000.000	142	142.000.000	284	213.000.000	426	284.000.000	568	284.000.000	568	568
	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Paket	1	130.729.500	1	1.846.952.206	1	1.184.643.063	1	1.465.411.705	1	1.384.958.091	1	1.548.848.231	1	1
	Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan produksi, mutu produk pertanian			1.035.006.950	-	12.040.000.000		5.325.000.000		5.271.000.000		5.680.000.000		17.950.000.000		
	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah komoditi yang bersertifikat/Determinasi	Komoditi	2	215.603.950	-	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	8
	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah bantuan bibit unggul Tanaman Pangan	Ha	1	-	-	5.696.455.054	1.200	2.490.000.000	600	1.836.000.000	450	2.575.000.000	600	4.000.000.000	1.800	6.000
		Jumlah bantuan bibit unggul komoditi Hortikultura	Pohon	2.367	226.576.000	-	2.303.544.946	10.000	1.425.000.000	5.500	1.425.000.000	5.500	1.425.000.000	5.500	6.000.000.000	28.500	52.367
		Jumlah bantuan bibit unggul komoditi Perkebunan	Pohon	11.976	-	-	3.000.000.000	40.000	1.000.000.000	13.000	1.000.000.000	13.000	1.000.000.000	13.000	5.000.000.000	40.000	41.976
		Jumlah Ternak Yang Diasuransikan	Ekor				160.000.000	4.000	160.000.000	4.000	160.000.000	4.300	280.000.000	4.000	1.600.000.000	4.000	4.000
		Jumlah hewan yang ditingkatkan kualitasnya	Ekor		77.968.000		250.000.000	5.000	100.000.000	5.000	150.000.000	5.000	250.000.000	5.000	500.000.000	10.000	10.000
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah ternak yang mendapatkan identitas/kartu milik hewan	Ekor		514.859.000		530.000.000	60.000	50.000.000		600.000.000	65.000	50.000.000		750.000.000	75.000	75.000

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam daerah Kabupaten/Kota				77.968.000	-	257.500.000		57.500.000		257.500.000		257.500.000		257.500.000		
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Bibit Ternak/Benih yang dilakukan Pengawasan mutu (Pelayanan inseminasi buatan dan Intensifikasi kawin alam)	Ekor		77.968.000	5.000	250.000.000	10.500	50.000.000	1.000	250.000.000	10.500	250.000.000	10.500	250.000.000	10.500	52.500
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Frekwensi pengawasan peredaran bahan pakan / bibit HPT	Kali		-		7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	4
Pengawasan Obat Hewan Di Tingkat Pengecer				-	-	17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		
Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Frekwensi pengawasan mutu khasiat dan keamanan obat hewan	Kali		-		7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	4
Penindakan Atas Penyimpanan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Frekuensi penindakan atas penyimpanan dan peredaran obat hewan	kali		-		10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	0
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan terhadap pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit ternak yang dilakukan pengawasan			77.898.500	-	105.884.075		100.000.000		330.000.000		475.000.000		375.000.000		
Penjaminan Peredaran Benih /Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Yang dijamin peredarannya	ekor/straw		-	-	0		20.000.000	400	50.000.000	1.000	100.000.000	2000	100.000.000	2000	5.400
Pengujian Mutu dan Benih Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang akan dilakukan pengujian	ekor/straw		-	-	0		20.000.000	400	50.000.000	1.000	100.000.000	2000	100.000.000	2000	5.400
pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih / bibit ternak yang tersertifikasi	Ekor/straw		-	-	0		25.000.000	500	75.000.000	1500	100.000.000	2000	100.000.000	2000	6.000
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/pakan	Jumlah hijauan pakan ternak, pakan dan bahan pakan yang dijamin peredarannya	Stek/kg		-	0	-	0	-	0	25.000.000	5000	25.000.000	5000	25.000.000	5000	15.000
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak HPT	Bulan	12	27.898.500	12	45.884.075	12	15.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	48
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	frekuensi produksi benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pakan dan bahan pakan yang dilakukan pengawasan	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	12	20.000.000	12	80.000.000	12	100.000.000	12	-	12	0
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan			1.463.500.000	-	2.330.000.000	85%	1.500.000.000	86%	1.814.000.000	86%	1.540.000.000	86%	2.085.000.000	86%	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan	Ekor/straw		1.453.500.000	161	2.160.000.000	240	1.350.000.000	150	1.575.000.000	175	1.350.000.000	150	1.890.000.000	210	1.000
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak, Pakan, dan bahan pakan	Stek/kg		10.000.000	9.999	170.000.000	170.000	150.000.000	150.000	239.000.000	239.000	190.000.000	150.000	195.000.000	150.000	859.000

III	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana sektor Pertanian Yang Tersedia	%	80	5.806.118.900	80	3.974.500.000	80	7.125.000.000	80	7.085.000.000	90	7.160.000.000	90	10.385.000.000	90	90
0	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas		-	2.237.833.900	-	480.000.000		380.000.000		130.000.000		130.000.000		230.000.000		
	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen peta lahan pertanian pangan berkelanjutan	dokumen	-	-	-	150.000.000	1	150.000.000	1	-	-	-	-	100.000.000	1	1
	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pertanian	Kegiatan	-	2.237.833.900	-	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	2
	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	Jumlah Dokumen Masterplan	dokumen	-	-	-	200.000.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kegiatan Pembangunan prasarana pertanian	Menurunnya jumlah luas areal pertanian yang mengalami kekeringan	Ha		3.568.285.000		3.494.500.000		6.745.000.000		6.955.000.000		6.980.000.000		10.105.000.000		
	Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani / Irigasi tirsier	Unit	-	-	-	860.000.000	4	2.106.000.000	9	2.106.000.000	9	2.106.000.000	9	2.340.000.000	10	41
	Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan embung	Unit	140	756.000.000	6	360.000.000	3	1.046.000.000	9	1.296.000.000	9	1.296.000.000	9	1.440.000.000	10	40
	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Unit	120	2.019.940.000	7	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	27
	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	Unit	75	756.000.000	6	360.000.000	3	840.000.000	3	840.000.000	3	840.000.000	3	840.000.000	3	21
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang di rehab/bangun	Unit	1	-										3.000.000.000	1	
	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan BPP	Unit	-	20.845.000	-	219.500.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	5
	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tanah/sumur bor, Jumlah Biogas asal ternak yang dibangun	Unit	713	15.500.000	2	895.000.000	5	1.303.000.000	5	1.263.000.000	5	1.288.000.000	5	1.035.000.000	5	25
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam daerah Kabupaten/Kota		ekor		-		-		-		-		50.000.000		50.000.000		
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilakukan pengawasan	wilayah/ekor		-								50.000.000	2	50.000.000	2	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN dan KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	14,76	246.750.050	15,45	939.000.000	15,44	480.000.000	13,94	614.000.000	12,44	594.000.000	10,94	1.104.000.000	9,44	9,44
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wabah penyakit hewan yang berhasil dikendalikan	Persen		65.772.050		400.000.000	14%	200.000.000	14%	200.000.000	14%	200.000.000	14%	500.000.000	14%	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	ekor		65.772.050		400.000.000	8.000	200.000.000	4.000	200.000.000	4.000	200.000.000	4.000	500.000.000	10.000	

	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persen		43.596.000		74.000.000	60%	50.000.000	60%	74.000.000	60%	74.000.000	60%	124.000.000	60%	
	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				-												
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan dan bahan hewan yang yang dilakukan pengawasan berdasarkan persyaratan teknis	Ekor		19.596.000		50.000.000	350	26.000.000	182	50.000.000	350	50.000.000	350	100.000.000	700	
	Pemeriksaan kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pos/lalu lintas pemeriksaan hewan dan produk hewan	pos		24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Petugas Pelayanan Jasa Laboratorium, Medik dan Paramedik Veteriner (Non ASN)	Persen		52.500.000		100.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	100%
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jasa laboratorium yang dsediakan	Orang		-		10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jasa medik dan paramedik veteriner yang disediakan	Orang		52.500.000		90.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persen		84.882.000		310.000.000	100%	125.000.000	100%	175.000.000	100%	150.000.000	100%	300.000.000	100%	100%
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan	Bulan		46.500.000		210.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	60
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan dan produk hewan yang dilakukan pengawasan dan peredarannya	BAH		38.382.000		50.000.000	15	25.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000	15	150.000.000	15	15
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel yang dilakukan pengujian di Laboratorium	sampel		-		50.000.000	300	25.000.000	150	50.000.000	300	50.000.000	300	50.000.000	300	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Persen		-		55.000.000	100%	25.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100%
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terkelolanya Rumah potong hewan sebagai penyedia daging asuh	ekor		-		55.000.000	4.500	25.000.000	5.000	85.000.000	5.500	90.000.000	6.000	100.000.000	6.500	
V	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	%	80	164.905.000	80	295.000.000	83	295.000.000	85	295.000.000	87	295.000.000	89	295.000.000	90	90
	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Menurunnya Kasus serangan OPT			164.905.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		
	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kasus serangan OPT pada tanaman pangan	kasus	-	-	-	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	15
		Jumlah kasus serangan OPT pada komoditi Hortikultura	kasus	-	65.000.000	-	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	10
		Jumlah kasus serangan OPT pada komoditi perkebunan	kasus	-	-	-	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	10
	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Jumlah kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerda) Hama dan Penyakit	jumlah kegiatan	-	49.953.000	-	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60
	Pencegahan Penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah pelatihan mitigasi pencegahan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pertanian	jumlah pelatihan	-	49.952.000	-	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	5

VI	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	%	50	48.601.525	50	100.000.000	50	100.000.000	50	140.000.000	50	145.000.000	50	250.000.000	50	50
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				48.601.525		100.000.000		85.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Usaha		39.910.525		30.000.000	30	40.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	100.000.000	60	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Usaha		8.691.000		70.000.000	120	45.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	100.000.000	250	
	Penerbitan Izin Usaha Produksi benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/pasar Hewan Rumah potong Hewan		Ha		-		-		10.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
	Penatausahaan Penerbitan izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong hewan	Jumlah izin usaha usaha peternakan yang difasilitasi untuk penerbitan izin	usaha		-		-		2.500.000	10	10.000.000	20	15.000.000	25	20.000.000	30	
	Pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Produksi Benih/bibit Ternak dan pakan	Frekuensi pengawasan usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	triwulan		-		-		2.500.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas pemeliharaan Hewan	Frekuensi pengawasan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan	triwulan		-		-		2.500.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Frekuensi pengawasan usaha pemotongan hewan	triwulan		-		-		2.500.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	
	Izin usaha Pengecer (Toko Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				-		-		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
	Pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Frekuensi pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan	triwulan		-		-		5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	
VII	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	%	71,18	533.929.000	26,25	642.500.000	26,25	617.500.000	19	642.500.000	19	642.500.000	19	808.500.000	19	19
		Persentase Kelompok Petani Yang Dibina	%	85		55		56		57		59		60		61	61
	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Meningkatnya Produksi/Produktivitas Pertanian			533.929.000		642.500.000		617.500.000		642.500.000		642.500.000		808.500.000		
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat fungsional	orang	-	451.908.000	-	470.000.000	21	270.000.000	15	270.000.000	15	270.000.000	15	470.000.000	15	81
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	kelompok	-	40.208.000	-	70.000.000	140	70.000.000	140	270.000.000	140	270.000.000	140	236.000.000	140	140
	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Kegiatan pameran tingkat Kabupaten / Provinsi/Nasional	paket	-	41.813.000	1	102.500.000	1	277.500.000	1	102.500.000	1	102.500.000	1	102.500.000	1	1

URUSAN PANGAN																	
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina	%	100	538.120.000	100	534.000.000	100	535.000.000	100	535.000.000	100	530.000.000	100	530.000.000	100	100
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			538.120.000		534.000.000		535.000.000		535.000.000		530.000.000		530.000.000		
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Paket	-	538.120.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	5
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur	Paket	-	-	-	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	5
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Mesin RMU	Paket	-	-	-	300.000.000	1 Unit Rumah RMU dan RMU	300.000.000	1 Unit Rumah RMU dan RMU	300.000.000	1 Unit Rumah RMU dan RMU	300.000.000	1 Unit Rumah RMU dan RMU	300.000.000	1 Unit Rumah RMU dan RMU	5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah laporan	Bulan	-	-	-	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	60
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah dokumen rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Dokumen	-	-	-	4.000.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
IX	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Perkapita	Kkal/kap/hr	4026,36	1.100.960.000	4.026,36 kkal	865.000.000	4.026,36 kkal	865.000.000	4.207,57 kkal	865.000.000	4.291,72 kkal	865.000.000	4.377,56 kkal	863.894.488	4.465,11 kkal	4.465,11 kkal
		Ketersediaan Protein Perkapita	Gram	98,71		98,71 Gram		98,71 Gram		100,69 Gram		102,70 Gram		104,70 Gram		106,85 Gram	106,85 Gram
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan			111.000.000		49.000.000		48.000.000		49.000.000		49.000.000		50.000.000		
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen	Dok	0	25.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Laporan	Bulan	0	-	0	5.000.000	0	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	5
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pemantauan Stock dan Hasil Analisis Pasokan dan Harga Pangan Pokok	Dok	0	36.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	5
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang dibina	Bulan	12	25.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	60
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) dan penguatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) yang dibina	Bulan	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	1
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan Kabupaten			339.930.000		258.000.000		260.000.000		259.000.000		259.000.000		256.894.488		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kali	0	20.000.000	1	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	6.894.488	12	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Dokumen	Dok	0	-	0	0	0	2.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	0	0	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Kg	2.600	250.000.000	16.000	225.000.000	15.000	225.000.000	15.000	225.000.000	15.000	225.000.000	15.000	225.000.000	15.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah yang terpelihara	Bulan	12	69.930.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	

	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target skor PPH ,pemanfaatan lahan pekarangan dan Pengankaragaman Konsumsi Pangan Beragam , Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber			650.030.000		558.000.000		557.000.000		557.000.000		557.000.000		557.000.000		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai Angka Kecukupan Gizi Pola Pangan Harapan (PPH)	Bulan	12	50.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	60
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang bina	KWT	10	530.100.000	9	550.000.000	15	550.000.000	15	550.000.000	15	550.000.000	15	550.000.000	15	75
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Tahunan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahunan	Orang	0	69.930.000	0	6.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	25
XI	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	389,13	251.809.980	100	263.000.000	100	263.000.000	100	265.000.000	100	263.000.000	100	263.000.000	100	100
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen Peta Rawan Pangan sebagai acuan dalam penyusunan program Ketahanan Pangan			25.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan sosialisasi FSVa	Dok	0	25.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Peta Rawan Pangan sebagai acuan dalam penyusunan program Ketahanan Pangan			226.809.980		255.000.000		254.000.000		255.000.000		253.000.000		253.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Dok	0	-	0	5.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	Kg		226.809.980	30378	250.000.000	30.000	250.000.000	30.000	250.000.000	30.000	250.000.000	30.000	250.000.000	30.000	150.000
XII	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	%	36	137.801.400	36	55.000.000	45	55.000.000	45	53.000.000	45	50.000.000	45	40.000.000	45	45
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah Kabupaten			137.801.400		55.000.000		55.000.000		53.000.000		50.000.000		40.000.000		
	Penguatan Kelembagaan keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan dan perlindungan masyarakat terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	0		0	13.000.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	100
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan produk pangan segar asal tumbuhan dari produsen	Persen	0		0	5.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	100
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan mutu dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan	Persen	0		0	6.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	100
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat prima sebagai syarat produk yang dihasilkan aman dikonsumsi	Persen	0	0	0	6.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan	Persen	36	137.801.400	90	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	20.000.000	90	12.000.000	90	90
Total					33.882.777.408		48.980.974.733		45.503.667.031		46.350.562.773		47.384.664.683		65.935.251.066		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran dan program yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang telah dirumuskan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah produksi pertanian	%	72	73	75	76	78	80
2.	Cakupan bina kelompok tani	%	71,18	54,57	57,29	60,16	63,17	66,33
3.	Ketersediaan pangan utama	%	389,13	415,96	415,96	432,75	441,40	449,60
4.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita							
	a. Ketersediaan Energi	kkal	7.423,66	4.025,36	4.207,57	4.291,72	4.377,56	4.465,11
	b. Ketersediaan Protein	gram	240,77	98,71	100,69	102,7	104,7	106,85
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	36	90	92	93	94	95



DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen resmi perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.

Target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra ini akan menjadi tujuan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dievaluasi setiap tahunnya melalui evaluasi capaian kinerja Renja terhadap Renstra dan evaluasi capaian indikator kinerja utama OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba sebagai penilaian kinerja keberhasilan dinas.

Demikian Renstra ini disusun untuk menjadi garis besar gagasan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini akan mengalami perbaikan dan pemutakhiran secara sistematis sesuai peraturan terkait tata cara penyusunan perencanaan, evaluasi dan monitoring.

Bulukumba, Januari 2022

/s/ Plt. Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Bulukumba



/s/ II. Musbani A. Wawo, MM
Panglima Pembina Utama Muda
Nip. 19621124 198903 2 005